

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Banten sebagaimana kondisi umumnya masyarakat di Indonesia pada tahun 1950-an baru saja memasuki paruh akhir revolusi. Dengan sisa-sisa energi dan semangat yang membara, Banten terus berupaya melepaskan diri dari situasi abnormal yang penuh dengan kekerasan, namun terus diliputi harapan dan romantika persatuan dan kesatuan. Orang Banten terperanjat dengan Undang-undang Dasar Sementara 1950, bahwa pemerintah dikelola berdasarkan sistem parlementer dengan kabinet dan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.¹

Tahun 1950-an adalah masa normalisasi yang sering dirujuk juga sebagai masa krisis, lesu, impasse, dan kegelapan. Masa 1950-an adalah masa multi partai yang mengacu kepada demokrasi liberal yang mengandung beberapa risiko besar. Hukum progresif sulit berjalan dengan sempurna. Perekenomian rakyat tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Masyarakat cenderung terpicat dengan jargon, dan terombang-ambing dalam penafsiran semantik tentang nilai-nilai humanisme universal, dan lokalisme. Masyarakat hidup dengan pilihan dilematis antara lambang-lambang berseni, intelektual, dan kebudayaan yang berhadapan dengan proses politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan keagamaan.²

¹ Yoyo Mulyana, *Meretas Kemandirian Perjuangan Panjang Rakyat Banten Menuju Provinsi*, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten: Banten, 2009), p. 23.

² Yoyo Mulyana, *Meretas Kemandirian Perjuangan Panjang Rakyat Banten Menuju Provinsi*, p. 24.

Kembalinya bentuk negara ke Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perkembangan yang penting dan bersejarah bagi Jawa Barat yaitu dibentuknya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1950. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Keresidenan Banten berada dibawah wilayah Jawa Barat yang juga melingkupin Keresidenan Jakarta, Keresidenan Bogor, Keresidenan Priangan dan Keresidenan Cirebon. Kemudian, Undang-Undang No. 14 tahun 1950 menetapkan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, di samping kabupaten-kabupaten lainnya.³

Pada tahun 1953, Banten merasa tertinggal dalam bidang pendidikan keagamaan, ekonomi, dan sosial politik, maka untuk pertama kalinya dimunculkan keinginan masyarakat Banten untuk meningkatkan status wilayahnya dari Keresidenan menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Jawa Barat. Keinginan ini muncul berkaitan berkaitan dengan diberikannya status Daerah Istimewa Yogyakarta dan munculnya tuntutan yang sama dari Aceh. Masyarakat Banten merasa bahwa Banten juga memiliki keistimewaan, yaitu tidak pernah menyerah kepada Belanda, pernah berdiri sendiri karena diblokade Belanda sampai mengeluarkan mata uang sendiri pada tahun 1949.⁴

³ Nina H Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah, Sultan, Ulama, Jawara*, (LP3S: Jakarta, 2003), p. 185.

⁴ Halwany Michrob dan A. Mujahid Chudary, *Catatan Mssa Lalu Banten*, (Penerbit Saudara Serang: Banten, 1993), p. 284.

Keinginan Banten untuk memisahkan diri dari Jawa Barat mendapatkan tantangan tersendiri mulai dari Cirebon, bahwa jika Banten menjadi daerah istimewa, maka sepatutnya Cirebon mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Tantangan ini bukan hanya datang dari elit daerah melainkan dari Presiden Soekarno. Dengan segala politik yang dijalankan oleh Soekarno, Banten tidak juga menjadi daerah istimewa. Pembangunan pabrik baja di daerah Cilegon dengan janji akan diberikan kompensasi 5% berupa imbalan dana. Hal inilah yang disampaikan oleh Chaerul Saleh mereduplah suara ingin memisahkan diri Jawa Barat. Akan tetapi, masyarakat Banten dihadapkan dengan dilema. Pertama, keuntungan mendirikan pabrik baja tentu sangat berguna bagi bangsa, sebab segala alat perang mulai dari senjata tajam dan senjata api terbuat dari baja, kemungkinan besar bangsa Indonesia disegani dunia karena memiliki bahan pembuatan alat perang; kedua, kekhawatiran sebagian masyarakat Banten dengan didirikannya pabrik baja, daerah Banten akan dikomunikasikan. Kekhawatiran itu wajar, sebab pembangunan pabrik tersebut didanai oleh Uni Soviet yang berhaluan ideologi komunis.⁵

Melihat situasi yang tidak menentu, Banten yang masih dalam lingkup Jawa Barat mendapat bantuan dari Kodam III Siliwangi dengan program pembangunan infrastruktur yang meliputi pendidikan keagamaan, ekonomi, dan sosial politik. Pada tahun 1961 Kodam III Siliwangi sudah mulai merintis pembangunan yaitu dimulai dengan pembangunan sarana pendidikan seperti kampus Universitas Maulana Yusuf. Di bawah kepemimpinan Mayjen Ibrahim Adjie, Kodam III Siliwangi banyak melakukan perubahan yang signifikan khususnya di Serang Banten. Akan tetapi, pada tahun 1965 terjadinya kekacauan yang

⁵ Yoyo Mulyana, *Meretas Kemandirian Perjuangan Panjang Rakyat Banten Menuju Provinsi*, p. 28.

menimbulkan stabilitas negara goyang, dan berpengaruh ke wilayah provinsi.⁶

Kodam III Siliwangi yang bertanggungjawab terhadap gerakan kudeta yang dilakukan oleh PKI segera bergerak. Gubernur Mashudi yang dibantu oleh Panglima Ibrahim Adjie menumpas PKI dan simpatisannya. Dari gerakan yang dilakukan oleh Kodam III Siliwangi, Jawa Barat berhasil melakukan pengamanan, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.⁷ Setelah penumpasan G30S/PKI, Kodam III Siliwangi kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sebelumnya Mayjen Ibrahim Adjie meresmikan Korem 064/Maulana Yusuf dengan misinya membendung gerakan Provinsi Banten. Gerakan pertama yang diagendakan Korem Maulana Yusuf adalah Operasi Bhakti Siliwangi secara besar-besaran yang di tingkat Kodam Wakil Panglima Operasinya adalah Brigjen Priatna.⁸

Dengan demikian, Operasi Bhakti seutuhnya ada dibawah tanggungjawab Korem 064/Maulana Yusuf. Satuan-satuan Siliwangi bekerja dan dibantu oleh masyarakat maupun tahanan kelas C yang ikut terlibat dalam pembangunan infrastuktur di Banten.⁹

Operasi Bhakti Siliwangi Korem Banten dilaksanakan di bawah Danrem Kolonel Senior Anwar Padmawijaya. Periode jabatannya diisi dengan membangun infrastruktur serta meningkatkan perekonomian Banten, seperti membangun gedung pertemuan umum Serang, merehabilitasi Pelabuhan Karangantu, Merenovasi Masjid Agung Banten, dan juga meneruskan pembangunan gedung Fakultas Syariah

⁶ Nina H. Lubis dkk, *Sejarah Banten, Membangun Tradisi dan Peradaban*, (Banten: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat, 2014), p. 285.

⁷ Taufik Abdullah dkk, *Malam Bencana 1965*, p. 72

⁸ Nina H. Lubis, *Sejarah Banten, Membangun Tradisi dan Peradaban*, p. 194.

⁹ Disjarahdam VI/Siliwangi, *Siliwangi dari Masa ke Masa*, (Angkasa: Bandung, 1979), p. 356.

Islam Maulana Yusuf Yayasan Universitas Maulana Yusuf (sekarang UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), Bendungan Curug Malingping, Pemandian Batu Kuwung dan lain-lain. Kodam III Siliwangi berhasil membendung hasrat masyarakat Banten yang merasa tertinggal karena infrastruktur tidak memadai.¹⁰ Pada tahun 1971 Operasi Bhakti Siliwangi selesai dengan banyak keberhasilan yang dibangun.

Berdasarkan penjelasan di atas kontribusi Kodam III Siliwangi dalam membangun infrastruktur di Banten menjadi sumbangsih besar untuk Banten. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Kontribusi Kodam III Siliwangi di Banten Tahun 1961-1971”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan bahwa masalah pokok yang akan diteliti dalam studi penelitian ini adalah kontribusi Kodam III Siliwangi di Banten. Kemudian dari masalah pokok tersebut diidentifikasi kepada masalah lain yang terperinci yaitu:

1. Bagaimana Latar Belakang Pertumbuhan dan Perkembangan Kodam III Siliwangi Tahun 1961-1971 M?
2. Bagaimana Kondisi Pembangunan di Banten Tahun 1961-1971 M?
3. Bagaimana Kontribusi Kodam III Siliwangi di Banten Tahun 1961-1971 M?

¹⁰ Yoyo Mulyana, *Meretas Kemandirian Perjuangan Panjang Rakyat Banten Menuju Provinsi*, p. 51.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk terwujudnya deskripsi yang dapat menjelaskan tentang:

1. Untuk Mengetahui Pertumbuhan dan perkembangan Kodam III Siliwangi tahun 1961-1971 M.
2. Untuk Mengetahui Kondisi pembangunan di Banten tahun 1961-1971 M.
3. Untuk Mengetahui Kondisi Kodam III Siliwangi di Banten tahun 1961-1971M.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka umumnya dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber-sumber bacaan yang terkait dengan tema yang diangkat penulis dalam penelitiannya. Tujuan utama dari kajian pustaka adalah untuk mengorganisasikan temuan peneliti. Hal ini penting karena pembaca akan dapat memahami mengapa tema tersebut dipilih oleh penulis untuk diteliti. Di samping itu, kajian pustaka juga bermaksud untuk menunjukkan bagaimana masalah tersebut dapat dikaitkan dengan hasil penelitian dengan pengetahuan yang lebih luas.

Penyusun kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan.¹¹ Dasar pertimbangan perlu disusunnya kajian pustaka dalam suatu rancangan penelitian didasari oleh kenyataan bahwa setiap objek kultural merupakan gejala

¹¹ Andi Prawoto, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), p. 81

multidimensi sehingga dapat dianalisis lebih dari satu kali secara berbeda-beda, baik oleh orang yang sama ataupun berbeda.¹²

Berdasarkan pengertian dan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dibuat dan didokumentasikan yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber dari penelitian terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

Buku karangan Djoko Sri Mulyono yang berjudul *Banten Seabad Setelah Multatuli* di dalamnya membahas tentang kesaksiannya saat menjadi tahanan politik di Banten tahun 1966-1971. Sebelumnya Moeljono adalah seorang Insinyur (Metalurgi) lulusan Moskow Rusia dan bekerja dipabrik besi Cilegon, tetapi Muljono ditahan dan yang dipekerjakan untuk membangun infrastruktur di Banten. Dari buku ini penulis hanya mengambil bagian saat Muljono bekerja membangun sarana pendidikan keagamaan, ekonomi dan sosial budaya.

Buku karangan Yoyo Mulyana dkk yang berjudul *Meretas Kemandirian Perjuangan Panjang Rakyat Banten Menuju Provinsi* di dalamnya membahas sejarah pergerakan rakyat Banten yang bersikeras ingin memisahkan dari provinsi Jawa Barat dan sampai pada terbentuknya provinsi Banten pada tahun 2000. Dalam buku ini juga membahas bagaimana Kodam III Siliwangi dibawah Mayjen Hartono Rekso Dharsono bersikap tegas kepada elit Banten yang kemudian mengambil kebijakan memperbaiki dan membangun sarana pendidikan keagamaan, ekonomi dan sosial budaya. Pengaruh Kodam III Siliwangi serta sikap Kodam III Siliwangi dalam pembangunan infrastruktur.

¹² Andi Prawoto, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*, p. 81.

Buku karangan Disjarahdan (Dinas Sejarah Angkatan Darat) VI/Siliwangi yang berjudul *Siliwangi dari Masa ke Masa* merupakan ekslopedi Kodam III Siliwangi yang di dalamnya terdapat banyak catatan kegiatan-kegiatan dari awal terbentuknya sampai lembaga-lembaga yang di bawah naungannya. *Siliwangi dari Masa ke Masa* ada bagian khusus yang singkat membahas tentang Operasi Bhakti yang menjadi suatu kontribusi Kodam III Siliwangi kepada masyarakat Jawa Barat termasuk Banten.

E. Kerangka Pemikiran

Penyebab pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh Kodam III Siliwangi dilatarbelakangi berbagai masalah. Yoyo Mulyana nampaknya menyederhakan penyebab peristiwa pembangunan ini dengan mengajukan faktor ekonomi sebagai penyebab utama. Dalam karyanya tentang perjuangan rakyat Banten menuju provinsi, ia menyelidiki aktivitas elit Banten yang mencoba mengadakan pertemuan rutin terhitung pada tahun 1953 untuk membahas kondisi Banten selepas kemerdekaan Indonesia. Untuk itulah elit Banten mencoba ingin memisahkan diri dari Jawa Barat karena merasa ketertinggalan dalam segi ekonomi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, karena stabilitas politik di Indonesia sedang mengalami guncangan maka persetujuan pemisahan dari Jawa Barat menjadi terhambat. Karena adanya gangguan ketertiban dan keamanan yang secara bersamaan telah mendorong terjadinya gerakan sosial dan politik. Oleh karena itu revitalisasi pembangunan di Banten dapat diidentifikasi sebagai suatu gerakan politik keagamaan yang mengakomodasi beragam ketegangan sosial di kalangan masyarakat.

Setelah meletusnya G30S PKI kondisi politik di Indonesia semakin memburuk dan berdampak pada rencana pembentukan provinsi Banten. Nina H Lubis, menyebutkan dengan terjadinya peristiwa ini Kodam III Siliwangi sebagai keamanan di Jawa Barat membersihkan unsur-unsur komunis. Mayjen Ibrahim Adjie membentuk suatu gerakan keamanan politik untuk menjaga kesetabilan yaitu Operasi Bhakti Siliwangi. Kodam III Siliwangi juga melakukan pengawasan ketat kepada panitia PPBB (Panitia Pembentukan Provinsi Banten).¹³ Artinya, Operasi Bhakti Siliwangi di Banten dilakukan atas dasar politik untuk menjaga keamanan dan sekaligus memperbaiki stabilitas ekonomi di Banten karena ketertinggalan. Dengan begitu, masyarakat Banten tidak merasakan keteringgalan kembali.

Kendati demikian, Operasi Bhakti adalah partisipasi TNI sebagai alat pertahanan negara dalam rangka membina wilayah di di bidang fisik materil dan mental, dilakukan atas perintah Panglima TNI dengan memanfaatkan tenaga, daya dan sarana dalam rangka Bhakti TNI.¹⁴ Tentu, gerakan Operasi Bhakti di sin walaupun wujud dari gerakan sosial, tetapi latar belakangnya adalah politik mengamankan PKI dan gerakan elit Banten.

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori konflik. Budi Satrio dalam bukunya *Resolusi Damai Konflik Kontemporer* mengutip pendapat Edwar Azar bahwa konflik adalah sebuah seperangkat sistem sosial dan sebuah ketegangan sosial yang muncul karena adanya perebutan kekuasaan antara dua belah pihak yang bersitegang demi mempertahankan daerah kekuasaanya, sehingga memunculkan

¹³ Nina H Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah, Sultan, Ulama, Jawara*, p. 191.

¹⁴ Mabesdad, *Buku Petunjuk Teknik tentang Bkakti TNI*, Skep Kasad No. Skep/480/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004, Jakarta 2004, p. 5.

keseimbangan antara dua pihak.¹⁵ Dalam hal ini Kontribusi Kodam III Siliwangi dilakukan untuk membendung masyarakat Banten yang ingin memisahkan diri dari Jawa Barat karena merasa tertinggal.

Pandangan lain mengenai teori konflik ini diungkapkan oleh Darwin, dalam buku Dean G, Pritt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Darwin mengatakan bahwa konflik adalah persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial. Orang yang menganggap situasi yang dihadapinya tidak adil atau menganggap bahwa kebijakan yang berlaku mengalami pertentangan dengan aturan yang sebelumnya.¹⁶ Dengan demikian elit Banten yang mendapat intervensi dari Kodam III Siliwangi tidak bisa berbuat banyak. Walaupun sebelumnya penduduk Banten merasa rugi dan tertintas atas kelambanan pembangunan menjadi berkurang atas turun gunungnya pasukan Kodam III Siliwangi.

Teori yang dikemukakan Edwar Azar dan Darwin merupakan teori yang tepat untuk diterapkan dalam melakukan penelitian ini. Asalnya adalah ketika elit Banten merasa tertinggal dalam segi infrastruktur dan lainnya hampir di manfaatkan oleh kepentingan PKI untuk dijadikan basis persebaran paham komunis ke elemen elit lebih dalam lagi. Hal ini menjadi faktor timbulnya gerakan Operasi Bhakti Siliwangi untuk keamanan politik di Banten sekaligus memperbaiki stabilitas ekonomi.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu penulisan untuk mencapai hasil yang maksimal dan objektif. Metode penelitian adalah seperangkat cara atau langkah yang ditempuh

¹⁵ Hugh Miall, et al., *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Terj. Budi Sastrio, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), p. 105.

¹⁶ Dean G, Pritt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), p. 9.

oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode Historis, yakni suatu langkah atau cara merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengkritik, mentafsirkan dan mensintesis data dalam rangka menegakkan fakta serta kesimpulan yang kuat.¹⁸ Dalam penelitian sejarah, prosedur yang harus dilakukan melalui empat tahapan yaitu: Tahap heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik atau pengumpulan data

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data sejarah. Kegiatan diarahkan pada peninjauan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan. Pada tahapan berikutnya, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas melalui studi pustaka dengan cara.¹⁹ Peneliti melakukan penelusuran perpustakaan di antaranya: perpustakaan milik Rumah Dunia yang didirikan oleh Gol A Gong, perpustakaan Iran Corner di Fakultas Ushuluddin dan Adab, dan perpustakaan kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku yang sangat menjurus kepada pembahasan telah didapat di perpustakaan tersebut, yaitu *Meretas Kemandirian Perjuangan Panjang Rakyat Banten Menuju Provinsi*. Di mana disebutkan pasca G30S PKI, dan peresmian Komando Resimen 064 Maulana Yusuf yang pula mengagas Operasi Bhaki Siliwangi untuk membangun ifrastruktur di Banten tahun 1966-1969. dan sumber awal dari inti peristiwa ini yaitu ditemukan di buku

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995), p.

¹⁸ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos, 1999), p. 55.

¹⁹ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), p. 92.

Banten Seabad Setelah Multatuli Catatan Seorang Tapol 12 Tahun dalam Tahanan, Kerja Rodi dan Pembangunan, yang mana penulis merupakan korban sekaligus saksi dalam peristiwa tersebut. Buku yang lainnya *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara* karya Nina Herlina Lubis, buku yang lainnya yang berkaitan *Kamus Kejahatan Orba: Cinta Tanah Air dan Bangsa* karya Hartusjo ada kesamaan dengan yang ditulis oleh Djoko Sri Mulyono dan buku karya Halwany Michrob, *Catatan Masa Lalu Banten*.

2. Verifikasi atau kritik sumber

Verifikasi yaitu suatu tahapan untuk mendapatkan keabsahan sumber data yang valid melalui kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ekstern adalah untuk menguji dan meneliti keotentikan sumber yang telah diperoleh, sehingga validitas sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kritik intern untuk mengetahui kredibilitas sumber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kritik intern, dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam dari berbagai literatur yang sudah didapatkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁰

3. Interpretasi dan penafsiran

Tahapan ini adalah kegiatan mentafsirkan fakta-fakta untuk memberikan makna dan pengertian serta menghidupkan kembali (*reliving*) proses sejarah. Dalam tahapan ini fakta-fakta yang ada dijadikan sebagai landasan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu itu ke dalam konteks kekinian.²¹

4. Historiografi atau penulisan

²⁰ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, p. 64.

²¹ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, p. 66.

Historiografi adalah penulisan sejarah. Penyajian dalam bentuk tulisan merupakan langkah terakhir dalam Metode Penelitian Sejarah. Tahapan heuristik, kritik sumber, serta interpretasi, kemudian digabungkan sehingga menghasilkan sebuah historiografi. Menulis kisah sejarah bukan sekedar menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. Dalam penulisan sejarah diperlukan aspek kronologi yang sesuai. Penyajian sejarah dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian yaitu pengantar, penulisan dan kesimpulan.²²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua Pertumbuhan dan Perkembangan Kodam III Siliwangi Tahun 1966-1971 yang terdiri dari Latar Belakang Terbentuknya Kodam III Siliwangi, Perkembangan Kodam III Siliwangi Tahun 1966-1971, dan Pertumbuhan Kodam III Siliwangi di Banten.

Bab ketiga Kondisi Pembangunan di Banten Tahun 1966-1971 yang terdiri dari Pembangunan pada Bidang Pendidikan dan Keagamaan, Pembangunan pada Bidang Ekonomi, dan Pembangunan pada Bidang Sosial Budaya.

²² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah.....*, p. 80.

Bab keempat Kontribusi Kodam III Siliwangi di Banten Tahun 1966-1971 yang terdiri dari Kontribusi Kodam III Siliwangi dalam Bidang Pendidikan Keagamaan, Kontribusi Kodam III Siliwangi dalam Bidang Ekonomi, dan Kontribusi Kodam III Siliwangi dalam Bidang Sosial Budaya.

Bab kelima Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.